



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
SIBOLGA
JALAN TENGGIRI NO. 10**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dirumuskan sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja dalam tataran prakteknya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, diimplementasikan melalui laporan pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 ini merupakan refleksi dari seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya good governance dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa kinerja yang telah kami lakukan sebagaimana tertuang dalam LKIP Tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya masukan yang korektif dan konstruktif sebagai referensi untuk peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk ditelaah dan dijadikan bahan selanjutnya.

Sibolga, Februari 2025

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA,**

RAMAYANA TARBUNAN, S.T., M. M.

Pembina Tk. I

NIP. 19720712 199203 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 18 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang melaksanakan urusan pilihan dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan untuk menyelaraskan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga dengan Visi Pembangunan Kota Sibolga yaitu **“Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”** dan Misi yang ditetapkan mendukung visi sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 maka dibuatlah Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan maka dibuatlah Indikator Kinerja yang merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan petunjuk mengenai kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Adapun Tujuan dan Sasaran strategis serta Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
Mewujudkan Pertumbuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan IKM dan Usaha Perdagangan	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
		Pertumbuhan Industri
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan
		Jumlah UTP yang ditera
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan yang terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga pada Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi kinerja untuk pencapaian kinerja sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu memperoleh rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%, masuk dalam kategori memuaskan.
2. Meningkatnya pelayanan kantor memperoleh rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%, masuk dalam kategori memuaskan.
3. Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu memperoleh rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%, masuk dalam kategori memuaskan.
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan memperoleh rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%, masuk dalam kategori Memuaskan.
5. Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk memperoleh rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%, masuk dalam kategori Memuaskan.
6. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen memperoleh rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%, masuk dalam kategori Memuaskan.

Berdasarkan indikator kinerja, dari segi akuntabilitas keuangan, dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Sibolga dan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran belanja sebesar Rp. 14.684.195.648,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.778.966.260,- atau sebesar 80,22%.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Penjelasan Umum Organisasi	2
a) Isu Strategis	2
b) Permasalahan	3
c) Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Organisasi	5
d) Anggaran Tahun 2024	9
3. Dasar Hukum	9
4. Sistematika Laporan Kinerja	10
Bab II Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
2.4 Metode Pengukuran	24
2.5 Perencanaan Anggaran	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi Anggaran	40
I. Pendapatan	44
II. Belanja	49
Bab IV Penutup	51

Lampiran :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah memberikan kewajiban dan pedoman bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang diawali dengan penyusunan perencanaan strategis, penjabaran visi, misi dan program kerja pembangunan yang menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pencapaiannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Kota Sibolga dalam mencapai tujuan, sasaran serta berbagai kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah, dan
4. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2. Penjelasan Umum Organisasi

a. Isu Strategis

Secara umum isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga sesuai dengan bidang urusannya adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan

Adapun permasalahan yang dihadapi untuk urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya penataan berkelanjutan dalam pelayanan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), karena di Kota Sibolga banyak pedagang kaki lima/asongan musiman;
- b. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan sehingga perlu revitalisasi pasar rakyat;
- c. Terbatasnya bantuan modal dan sarana usaha bagi pedagang;
- d. Kurangnya fasilitas umum yang iconic di Kota Sibolga yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
- e. Masih terbatasnya peningkatan kemampuan SDM Pengelola Pasar untuk menciptakan SDM yang handal dalam bidangnya;
- f. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan tera dan Tera Ulang serta SDM Fungsional tera kemetrolagian;

- g. Kurang optimalnya pengawasan produk makanan, minuman dan kosmetik.

2. Perindustrian

Adapun permasalahan yang dihadapi untuk urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kota Sibolga.
- b. Menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- c. Masih rendahnya pembinaan bagi kelompok pengrajin sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan berkelanjutan bagi kelompok pengrajin di Kota Sibolga.
- d. Rendahnya daya saing industri kecil menengah dikarenakan biaya produksi yang tinggi (Bahan Baku dan Upah)
- e. kurangnya akses informasi pemasaran dan penguasaan teknologi pada IKM yang belum optimal.
- f. Masih rendahnya minat masyarakat Kota Sibolga untuk membeli produk hasil IKM lokal.
- g. Masih terbatasnya peningkatan kemampuan SDM dibidang pengembangan industri untuk menciptakan SDM yang handal dalam bidangnya.

b. Permasalahan

Dalam memperoleh pencapaian tersebut, terdapat beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas selama Tahun 2024 dan Solusi/Upaya yang diusulkan untuk ditempuh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemui antara lain :

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	<p>Pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan produk makanan, minuman dan kosmetik yang memakai merk maupun tidak dan dalam keadaan terbungkus yang diduga terindikasi bahan berbahaya dan kegiatan pemeriksaan dan kunjungan produk makanan, minuman dalam rangka mewujudkan pasar sehat, petugas menemukan adanya makanan dan minuman, buah dan kosmetik yang berbahaya untuk dikonsumsi dan adanya produk yang sudah expired tetapi masih dipajang di etalase toko, petugas hanya bisa memberikan teguran dan surat pemberitahuan tetapi tidak bisa melakukan penyitaan dan Tindakan lanjutan lainnya.</p>	<p>Diadakan Pendidikan PPNS bagi ASN</p>
2.	<p>Pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan produk makanan, minuman dan kosmetik yang memakai merk maupun tidak dan dalam keadaan terbungkus yang diduga terindikasi bahan berbahaya dan kegiatan pemeriksaan dan kunjungan produk makanan, minuman dalam rangka mewujudkan pasar sehat, petugas tidak bisa menentukan mana bahan makanan dan minuman yang terindikasi zat-zat berbahaya pada saat melakukan pengawasan ke lapangan karena tidak memiliki alat Tes KIT</p>	<p>Pengadaan Alat Tes KIT</p>
3.	<p>Masih kurangnya IKM yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</p>	<p>Pendampingan Fasilitasi Izin Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</p>
4.	<p>Kurang diminatinya keberadaan rumah promosi sebagai tempat mempromosikan produk IKM Kota Sibolga</p>	<p>Arahan untuk berbelanja di Rumah Promosi kepada ASN kota Sibolga. Baik untuk oleh-oleh maupun untuk keperluan pribadi atau dinas.</p>
5.	<p>Keterbatasan staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>Memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk pelaksanaan seluruh kegiatan</p>
6.	<p>Tidak adanya SDM Penera dan Pengawas untuk kemetrologian</p>	<p>Diadakan Diklat untuk Penera dan Diklat PPNS</p>
7.	<p>Tidak tersedianya kendaraan dinas operasional untuk Bidang Metrologi Legal</p>	<p>Agar dapat dianggarkan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional untuk Bidang Metrologi Legal</p>
8.	<p>Kurangnya alat uji UTTP dan kelengkapannya.</p>	<p>Agar dapat dianggarkan untuk pengadaan alat uji UTTP dan kelengkapannya</p>

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
9.	Kurangnya anggaran untuk operasional pelayanan serta verifikasi dan pemeliharaan alat-alat UTTP	Agar anggaran dapat ditambahkan untuk memaksimalkan pelayanan
10.	Kecilnya jenis tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang	Mengajukan usulan kenaikan jenis tarif pelayanan Tera/Tera Ulang

c. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang melaksanakan urusan pilihan yang terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, susunan Pejabat Struktural dan fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Sibolga membawahi 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

3. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga membawahi 3 (Tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
- b. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengawasan Perindustrian;
- c. Kepala Seksi Promosi, Kerajinan dan Sarana Usaha Perindustrian.

4. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga membawahi 3 (Tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
- b. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Usaha Perdagangan;
- c. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengawasan Usaha Perdagangan.

5. Kepala Bidang Metrologi Legal

Kepala Bidang Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga membawahi 3 (Tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Massa dan Timbangan
- b. Kepala Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume
- c. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

6. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen

Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga membawahi 3 (Tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen
- b. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

c. Kepala Seksi Informasi, Standarisasi dan Pengendalian Mutu

7. Kepala UPT Pasar

Kepala UPT Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

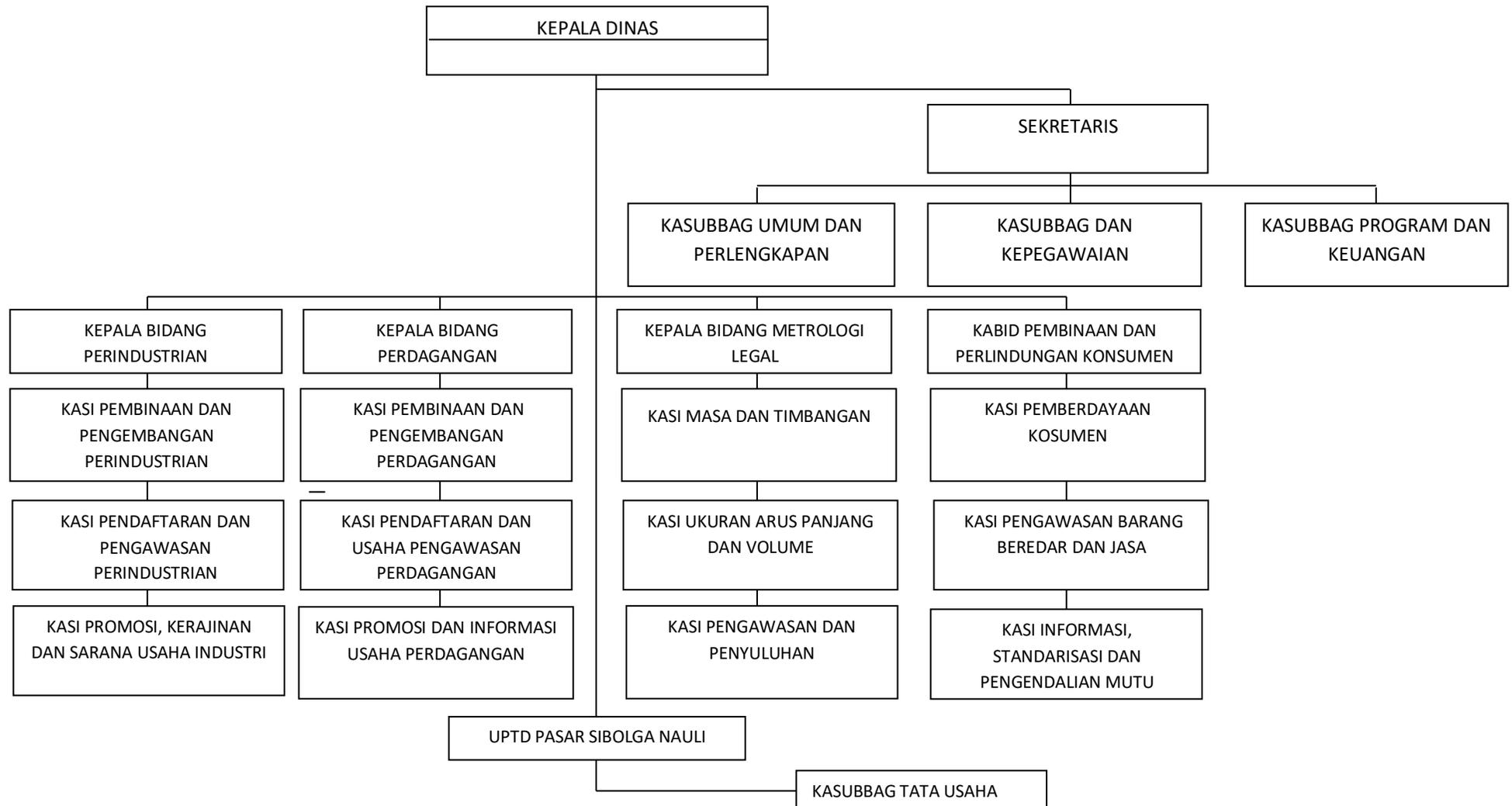
Melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka pada tanggal 30 Mei 2022 ditetapkanlah Keputusan Walikota Sibolga tentang Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga.

Dalam pelaksanaan penyetaraan tersebut diperlukan adanya proses adaptasi dan penyesuaian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sebagai dampak dari penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, sehingga perlu adanya pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas administratif pada jabatan pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.

Adapun proses adaptasi dan penyesuaian yang dimaksud adalah pejabat administrasi yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga diberikan tugas tambahan dan diangkat sebagai Subkoordinator dalam rangka pemenuhan tugas-tugas administrasi pada jabatan pengawas tersebut.

Secara skematis, Stuktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga dapat dilihat pada gambar berikut :

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga



d. Anggaran Tahun 2024

Dana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024, dengan pagu anggaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
I	Pendapatan	9.216.980.410,00	
II	Belanja Daerah	14.684.195.148,00	
	Belanja Operasi	10.826.408.801,00	
	Belanja Modal	3.857.786.347,00	

Pagu Anggaran untuk Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 9.216.980.410,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) dan Pagu Anggaran untuk Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 14.684.195.148,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rician Belanja Operasi Rp. 10.826.408.801,00 dan Belanja Modal Rp. 3.857.786.347,00.

3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga ini disusun dengan mengacu sepenuhnya kepada berbagai aturan hukum terkait, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga yang didalamnya terdapat struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.

4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, LKIP ini terdiri atas 4 Bab dengan dukungan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabulasi, dengan uraian umum masing-masing sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi yang melekat pada organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, Struktur dan Tata Kerja Organisasi, Dasar Hukum Penyusunan LKIP, serta uraian menyangkut sistematika penulisan dan penyajian laporan yang digunakan.

1. Latar belakang;
2. Penjelasan Umum Organisasi;
3. Dasar Hukum;
4. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini diuraikan proses dan tahapan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rumusan kebijakan dan turunannya dalam bentuk program kerja yang diuraikan dalam rincian rencana kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun pelaporan.

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kerja Tahun 2024
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2.4 Metode Pengukuran
- 2.5 Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga yang disusun secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun Strategi yang ditetapkan adalah :

1. Penyampaian Dokumen Perencanaan tepat waktu melalui Koordinasi dan Asistensi OPD yang terkait dengan Perencanaan.
2. Peningkatan Pelayanan Kantor melalui Birokrasi yang Efektifitas dan Efisiensi.
3. Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan tepat Waktu melalui Sistem Aplikasi Keuangan dan Data - Data Keuangan dengan baik.
4. Meningkatkan pelatihan, pembinaan dan pengembangan IKM/Pengrajin.
5. Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Produk, Menggali Peluang dan Memperkenalkan Produk Unggulan.
6. Menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan IKM/Pengrajin.
7. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar.
9. Meningkatkan Penataan Berkelanjutan dalam Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha/Pedagang.
10. Meningkatkan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar.
11. Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal.
12. Meningkatkan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
13. Meningkatkan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.

TABEL 2.1.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel						
		Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,82%	74,30%	82%	84%	86%	88%
		Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	A	A	A	A	A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4						
2	Mewujudkan Pertumbuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan IKM dan Usaha Perdagangan		Meningkatnya pertumbuhan, pengembangan dan Pemberdayaan IKM dan Usaha Perdagangan						
		Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	53%	64,29%	60%	65%	70%	75%
			Pertumbuhan Industri	3 IKM	31 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM
			Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	235 Pengrajin	230 Pengrajin	150 Pengrajin	150 Pengrajin	150 Pengrajin	150 Pengrajin
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	14,10%	29,62%	17,07%	18,77%	20,65%	22,72%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4						
			Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	6.000 RTM	8.070 RTM	6.900 RTM	7.935 RTM	9.522 RTM	10.950 RTM
			Jumlah UTPP yang ditera	68 Unit	356 Unit	125 Unit	125 Unit	125 Unit	125 Unit
			Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	20%	20%	20%	20%	20%	20%
			Jumlah Pendapatan Asli Daerah	751.123.300	644.430.000	6.485.749.000	6.485.749.000	6.485.749.000	6.485.749.000

TABEL 2.1.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi /Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penyampaian Dokumen Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Permintaan Dokumen Perencanaan}} \times 100 \%$	Sekretariat
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Nilai Indeks IKM	Sekretariat
3	Penyampaian Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Permintaan Pertanggungjawaban Keuangan}} \times 100 \%$	Sekretariat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi /Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	Huruf	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	Sekretariat
5	Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin yang Mendapatkan Bantuan Binaan Pemda Tahun } n}{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin}} \times 100 \%$	Bidang Perindustrian
		Pertumbuhan Industri	Jumlah IKM	Jumlah IKM yang Bertambah	Bidang Perindustrian
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	Jumlah Pengrajin	Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	Bidang Perindustrian
		Frekuensi Pameran Produk sebagai Ajang Promosi	Kali	Pelaksanaan Pameran Produk	Bidang Perindustrian

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi /Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan, Terwujudnya Tertib Ukur, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang Mendapatkan Bantuan Binaan Pemda Tahun n}}{\text{Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal}} \times 100 \%$	Bidang Perdagangan
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpelihara Sarana dan Prasarananya	Angka	Jumlah Pasar yang Terpelihara Sarana dan Prasarana	Bidang Perdagangan
		Jumlah RTM yang Mendapatkan Bantuan	Jumlah RTM	Jumlah RTM yang Mendapatkan Bantuan	Bidang Perdagangan
		Jumlah UTTP yang ditera	Jumlah Unit	Jumlah Unit UTTP yang ditera	Bidang Metrologi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi /Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	$\frac{\text{Jumlah sampel produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya pada tahun berjalan yang sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah sampel produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus dalam tahun berjalan}} \times 100 \%$	Bidang Perlindungan Konsumen
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Angka	Jumlah Unit x Hari Kerja x 12 Bulan	UPTD PASAR SIBOLGA NAULI

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Resntra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Dokumen	
		Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase	100%
		Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	84%
		Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase	100%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	Angka	A
2	Mewujudkan Pertumbuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan IKM dan Usaha Perdagangan		Meningkatnya pertumbuhan, pengembangan dan Pemberdayaan IKM dan Usaha Perdagangan		
		Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	65%
			Pertumbuhan Industri	Jumlah IKM	5 IKM
			Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	Jumlah Pengrajin	150 Pengrajin
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	18,77%		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
			Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	Jumlah RTM	7.935 RTM
			Jumlah UTP yang ditera	Jumlah Unit	125 Unit
			Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	Persen	20%
			Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Angka	6.485.749.000

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga merupakan sebuah dokumen perjanjian kinerja yang pada dasarnya memuat pernyataan kesanggupan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pimpinan organisasi yang dalam tatanan organisasi Pemerintah Kota Sibolga merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepada Walikota Sibolga sebagai atasan langsungnya untuk mewujudkan target-target kinerja tertentu.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	Nilai Indeks IKM
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penyampaian Dokumen	A (85,01)	LAKIP
4	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	9.216.980.410	Jumlah Unit x Hari Kerja x 12 Bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.762.245.562	INSENTIF FISKAL
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	300.000.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.438.758.870	APBD
4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	479.050.150	INSENTIF FISKAL
	Jumlah	14.980.054.582	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

TABEL 2.3.2
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	Nilai Indeks IKM
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penyampaian Dokumen	A (85,01)	LAKIP
4	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	9.216.980.410	Jumlah Unit x Hari Kerja x 12 Bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.913.117.628,00	INSENTIF FISKAL
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.481.412.677,00	APBD / INSENTIF FISKAL
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.706.068.793,00	APBD
4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	583.596.550	APBD / INSENTIF FISKAL
	Jumlah	14.684.195.148	

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.4 Metode Pengukuran

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja OPD.

Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target 2024}} \times 100\%$$

2.5 Perencanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024, dengan pagu anggaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
I	Pendapatan	9.216.980.410,00	
II	Belanja Daerah	14.684.195.148,00	
	Belanja Operasi	10.826.408.801,00	
	Belanja Modal	3.857.786.347,00	

Pagu Anggaran untuk Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 9.216.980.410,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribuh Empat Ratus Sepuluh Rupiah)

dan Pagu Anggaran untuk Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 14.684.195.148,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rician Belanja Operasi Rp. 10.826.408.801,00 dan Belanja Modal Rp. 3.857.786.347,00.

Adapun Alokasi dan Realisasi Program dan Kegiatan per urusan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN	KEUANGAN/ ANGGARAN (Rp)			
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	%
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.394.530.305	3.840.540.045	553.990.260	87,40 %
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.289.426.215	7.938.426.215	2.351.000.000	77,16 %
	TOTAL	14.684.195.648	11.778.966.260	2.904.990.260	80,22%

Urusan Perindustrian terdiri dari 2 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Dari 2 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan ini, diantaranya terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Umum untuk kegiatan rutin Bidang Sekretariat dengan jumlah 1 Program, 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melaksanakan 2 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi), membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, dan membandingkan antara realisasi Tahun 2024 dengan target Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91 \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
(2)	$76 \leq 90 \%$	Tinggi
(3)	$66 \leq 75 \%$	Sedang
(4)	$51 \leq 65 \%$	Rendah
(5)	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

TABEL 3.1.1
MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	80,53	95.87%	Sangat Tinggi	Sekretariat
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	A	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat
5	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	65%	0	0%	Sangat Rendah	Bidang Industri
		Pertumbuhan Industri	5 IKM	30 IKM	100%	Sangat Tinggi	Bidang Industri
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	150 Pengrajin	0 Pengrajin	0%	Sangat Rendah	Bidang Industri

6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	18,77%	0%	0%	Sangat Rendah	Bidang Perdagangan
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	7.935 RTM	4.500 RTM	56,71%	Rendah	Bidang Perdagangan
		Jumlah UTP yang ditera	125 Unit	0 Unit	0%	Sangat Rendah	Bidang Metrologi
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	20%	20%	100%	Sangat Tinggi	Bidang Perlindungan Konsumen
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.485.749.000	1.353.422.000	20,87%	Sangat Rendah	UPTD PASAR SIBOLGA NAULI

TABEL 3.1.2
MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023, 2022, 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,82%	74,30	75,30	84%	80,53	95.87%
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	A	A	A	A	100%
5	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	53%	64,29%	42,85%	65%	0	0%
		Pertumbuhan Industri	3 IKM	31 IKM	22 IKM	5 IKM	30 IKM	140%
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	235 Pengrajin	230 Pengrajin	300 Pengrajin	150 Pengrajin	0 Pengrajin	0%

6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	14,10%	29,62%	27,27%	18,77%	0%	0%
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	6.000 RTM	8.070 RTM	10.000 RTM	7.935 RTM	4.500 RTM	56,71%
		Jumlah UTTP yang ditera	68 Unit	356 Unit	250 Unit	125 Unit	0 Unit	0%
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	20%	20%	20%	20%	20%	100%
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	751.123.300	644.430.000	209.455.500	6.485.749.000	1.353.422.000	20,87%

TABEL 3.1.3
MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2024	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,53	84%	95,87%
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	A	100%
5	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0	65%	0%
		Pertumbuhan Industri	30 IKM	5 IKM	100%
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	0 Pengrajin	150 Pengrajin	0%
6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0%	18,77%	0%
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	4.500 RTM	7.935 RTM	56,71%
		Jumlah UTTP yang ditera	0 Unit	125 Unit	0%
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	20%	20%	100%
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.353.422.000	6.485.749.000	20,87%

TABEL 3.1.4
MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
DENGAN STANDAR NASIONAL

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL/ PROVINSI/ NAMA DAERAH LAIN	% CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100		
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	N	N		
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,53				
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%				
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A				
5	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0			I	I
		Pertumbuhan Industri	30 IKM			H	H
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	0 Pengrajin			I	I
6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0%			L	L
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	4.500 RTM			I	I
		Jumlah UTP yang ditera	0 Unit			L	L
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	20%				
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.353.422.000				

TABEL 3.1.5
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN
KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	80,53	95.87%		
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%		
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	A	100%		
5	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	65%	0	0%	Tidak ada Pembinaan untuk Kelompok Pengrajin	Agar di Tampung Anggarannya
		Pertumbuhan Industri	5 IKM	30 IKM	100%		
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	150 Pengrajin	0 Pengrajin	0%		

6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	18,77%	0%	0%	Tidak ada Pembinaan untuk Usaha Informal	Agar di Tampung Anggarannya
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	7.935 RTM	4.500 RTM	56,71%	Berkurangnya Anggaran	
		Jumlah UTTP yang ditera	125 Unit	0 Unit	0%	Tidak ada lagi Target untuk UTTP Tera	
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	20%	20%	100%		
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.485.749.000	1.353.422.000	20,87%	Terlalu tinggi Target PAD	Menurunkan Target PAD

TABEL 3.1.6
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN
KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%	9.706.068.793	7.403.611.386	76,28%
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	80,53	95.87%			
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%			
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	A	A	100%			
5	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	65%	0	0%	583.596.550,00	534.814.829,00	91.64%
		Pertumbuhan Industri	5 IKM	30 IKM	100%			
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	150 Pengrajin	0 Pengrajin	0%			

6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	18,77%	0%	0%	2.913.117.628,00	2.369.220.145,00	81.33%
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	7.935 RTM	4.500 RTM	56,71%			
		Jumlah UTP yang ditera	125 Unit	0 Unit	0%	0	0	0
		Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	20%	20%	100%			
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.485.749.000	1.353.422.000	20,87%	9.216.980.410,00	1.353.422.000,00	14.68%

TABEL 3.1.7
ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pembuatan Perencanaan Kerja, Evaluasi, Pelayanan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Kantor	76,28%	MENUNJANG	TINGGI
2	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	95.87%					
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100%					
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga	100%					

5	Terwujudnya pengembangan IKM, pengembangan sentra-sentra industri potensial dan peningkatan daya saing produk	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	0%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	91.64%	MENUNJANG	SANGAT TINGGI
		Pertumbuhan Industri	100%					
		Jumlah Pengrajin yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan	0%					
6	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Penyediaan dan Peningkatan Sarana serta	81.33%	MENUNJANG	TINGGI
		Jumlah RTM Yang Mendapatkan Bantuan	56,71%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi				

		Perdagangan	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan dan Pengendalian serta Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya			
Jumlah UTP yang ditera	0%					
Persentase Pengawasan Produk yang beredar dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus yang diduga terindikasi zat-zat berbahaya terhadap ketentuan yang berlaku	100%					
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	20,87%	PAD	PAD	14.68%	TIDAK MENUNJANG	RENDAH

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2023, dengan pagu anggaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
I	Pendapatan	9.216.980.410,00	
II	Belanja Daerah	14.684.195.148,00	
	Belanja Operasi	10.826.408.801,00	
	Belanja Modal	3.857.786.347,00	

Pagu Anggaran untuk Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 9.216.980.410,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) dan Pagu Anggaran untuk Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 14.684.195.148,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rician Belanja Operasi Rp. 10.826.408.801,00 dan Belanja Modal Rp. 3.857.786.347,00.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran per program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
Tahun 2024

KODE					NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
4					PENDAPATAN	9.216.980.410	1.353.422.000	7.863.558.410	14.68%
4.1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.216.980.410	1.353.422.000	7.863.558.410	14.68%
4.1	02				Retribusi Daerah	9.216.980.410	1.353.422.000	7.863.558.410	14.68%
4.1	02	01			Retribusi Jasa Umum	8,869,410,550	1.254.879.000	7.614.531.550	14.15%
4.1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar	8.831.460.550	1.254.879.000	7.576.581.550	14.20%
4.1	02	01	05	00 01	Retribusi Pelataran	3.850.000.000	521.170.000	3.328.830.000	13.54%
					Retribusi Pelataran	3.850.000.000	521.170.000	3.328.830.000	13.54%
4.1	02	01	05	00 02	Retribusi Los	284.460.550	191.909.000	92.551.550	67.46%
					Retribusi los	284.460.550	191.909.000	92.551.550	67.46%
4.1	02	01	05	00 03	Retribusi Kios	4.697.000.000	550.200.000	4.146.800.000	11.71%
					Retribusi Kios	4.697.000.000	550.200.000	4.146.800.000	11.71%
4.1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	37.950.000	0	0	0%
4.1	02	01	11	00 01	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan	37.950.000	0	0	0%
					Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan	37.950.000	0	0	0%
4.1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	347.569.860	90.143.000	257.426.860	25.94%
4.1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.080.000	0	0	0%
4.1	02	02	01	00 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.080.000	0	0	0%
					Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.080.000	0	0	0%
4.1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir	344.489.860	90.143.000	254.346.860	26.17%
4.1	02	02	05	00 01	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	344.489.860	90.143.000	254.346.860	26.17%

KODE					NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
					Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	344.489.860	90.143.000	254.346.860	26,17%
5					BELANJA	14.684.195.648	11.778.966.260	2.905.229.388	80,22%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	14.684.195.648	11.778.966.260	2.905.229.388	80,22%
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.394.530.305	3.840.540.045	553.990.260	87,39%
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.913.117.628	2.369.220.145	543.897.483	81,33%
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.752.706.228	2.248.024.445	504.681.783	81,67%
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.476.28.328	1.983.286.650	493.641.678	80,07%
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	275.777.900	264.737.795	11.040.105	96,00%
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	160.411.400	121.195.700	39.215.700	75,55%
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.500.000	10.500.000	0	100,00%
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	149.911.400	110.695.700	39.215.700	73,84%
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.481.412.677	1.471.319.900	10.092.777	99,32%
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.005.825	46.742.400	3.263.425	93,47%
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.431.406.852	1.424.577.500	6.829.352	99,52%
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.289.665.343	7.938.426.215	2.351.239.128	77,15%
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.706.068.793	7.403.611.386	2.302.457.407	76,28%
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.284.473.226	4.566.197.187	1.718.276.039	72,66%

KODE					NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.284.473.226	4.566.197.187	1.718.276.039	72,66%
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.783.950	437.847.619	16.936.331	96,28%
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.247.900	16.034.000	1.213.900	92,96%
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.544.200	93.505.400	3.038.800	96,85%
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.172.100	66.129.000	3.043.100	95,60%
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.080.150	22.809.000	1.271.150	94,72%
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.704.630	61.702.000	2.630	100,00%
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.658.000	8.645.000	13.000	99,85%
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.376.970	169.023.219	8.353.751	95,29%
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.632.436.543	2.192.675.280	439.761.263	83,29%
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.100.000	400.000	91,11%
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.341.936.543	928.875.280	413.061.263	69,22%
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.286.000.000	1.259.700.000	26.300.000	97,95%
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.375.074	206.891.300	127.483.774	61,88%
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.905.500	99.846.250	2.059.250	97,98%
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.309.574	102.555.050	117.754.524	46,55%
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.160.000	4.490.000	7.670.000	36,92%
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	583.596.550	534.814.829	48.781.721	91,64%
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	583.596.550	534.814.829	48.781.721	91,64%
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	583.596.550	534.814.829	48.781.721	91,64%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

Total Realisasi Anggaran Pendapatan : 14,68%

Total Realisasi Belanja : 80,22%

Adapun Alokasi dan Realisasi Program dan Kegiatan per urusan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN	KEUANGAN/ ANGGARAN (Rp)			
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	%
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.394.530.305	3.840.540.045	553.990.260	87,40 %
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.289.426.215	7.938.426.215	2.351.000.000	77,16 %
	TOTAL	14.684.195.648	11.778.966.260	2.904.990.260	80,22%

Urusan Perindustrian terdiri dari 2 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Dari 2 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan ini, diantaranya terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Umum untuk kegiatan rutin Bidang Sekretariat dengan jumlah 1 Program, 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melaksanakan 2 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

I. PENDAPATAN

Pendapatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga berasal dari Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari :

- a. Retribusi Pelataran

b. Retribusi Los

c. Retribusi Kios

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan dan Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Kios Jalan Rajawali tidak Realisasi karena Pedagang tidak mau membayar sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2024).

Retribusi Tempat Khusus Parkir terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Adapun Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KODE					NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	
4					PENDAPATAN	9.216.980.410	1.353.422.000	7.863.558.410	14.68%	
4.	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.216.980.410	1.353.422.000	7.863.558.410	14.68%	
4.	1	02			Retribusi Daerah	9.216.980.410	1.353.422.000	7.863.558.410	14.68%	
4.	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	8,869,410,550	1.254.879.000	7.614.531.550	14.15%	
4.	1	02	01	05	Retribusi Pelayanan Pasar	8.831.460.550	1.254.879.000	7.576.581.550	14.20%	
4.	1	02	01	05	00 01	Retribusi Pelataran	3.850.000.000	521.170.000	3.328.830.000	13.54%
					Retribusi Pelataran	3.850.000.000	521.170.000	3.328.830.000	13.54%	
4.	1	02	01	05	00 02	Retribusi Los	284.460.550	191.909.000	92.551.550	67.46%
					Retribusi los	284.460.550	191.909.000	92.551.550	67.46%	
4.	1	02	01	05	00 03	Retribusi Kios	4.697.000.000	550.200.000	4.146.800.000	11.71%
					Retribusi Kios	4.697.000.000	550.200.000	4.146.800.000	11.71%	

KODE					NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
4.1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	37.950.000	0	0	0%
4.1	02	01	11	00 01	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan	37.950.000	0	0	0%
					Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan	37.950.000	0	0	0%
4.1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	347.569.860	90.143.000	257.426.860	25.94%
4.1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.080.000	0	0	0%
4.1	02	02	01	00 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.080.000	0	0	0%
					Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.080.000	0	0	0%
4.1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir	344.489.860	90.143.000	254.346.860	26.17%
4.1	02	02	05	00 01	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	344.489.860	90.143.000	254.346.860	26.17%
					Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	344.489.860	90.143.000	254.346.860	26.17%

Adapun penjelasan untuk pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran terealisasi sebesar 13,54% yang terdiri dari Retribusi Pelataran Lantai I,II dan III Pasar Sibolga Nauli, Retribusi makanan dan minuman, Pelataran Pasar Inpres Aek Habil, Pelataran Jaja Keliling Kota Beringin, Pelataran Jajan Keliling Pasar Juada Malam dan Retribusi Penggantian Rekening Listrik. Dari keenam rincian Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran, yang paling rendah realisasinya adalah Retribusi Lantai I Pasar Sibolga Nauli sebesar 9.19%. Adapun penjelasan atas realisasi ini sebagai berikut :

3.2.1.1.1.1 Pada Tahun 2024 Pedagang sudah berada di area lokasi Pasar Sibolga Nauli dengan kondisi lapangan sudah stabil (bangunan dan pedagang telah tersusun rapi sesuai dengan kiosnya masing-masing). berdasarkan keputusan Peraturan Menteri.

3.2.1.1.1.2 Setelah selesainya pembangunan Pasar Sibolga Nauli, pemungutan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 40 ayat 2 yang berisi: dalam hal Sarana Perdagangan belum dihibahkan, Gubernur atau Bupati/Walikota tidak dapat memungut Retribusi pemamfaatan bangunan Sarana Perdagangan. Dan Pengutipan di Pasar Sibolga Nauli di Mulai awal Bulan Lima Tahun 2024 dan memakai Perda No.1 Tahun 2024. Beban PAD yang di bebaskan ke Retribusi Pelataran Lantai I,II dan III tidak sesuai dengan Potensi yang ada di Lapangan sementara harga karcis retribusi pelataran adalah Rp. 5.000/hari/tempat dan pengutipan dilaksanakan mulai bulan mei tahun 2024.

- b. Retribusi Pelayanan Pasar-Los terealisasi sebesar 67.46% yang terdiri dari Retribusi Meja Daging Pasar Sibolga Nauli, Retribusi Meja Unggas Pasar Sibolga Nauli, Meja Unggas Pasar Inpres Aek Habil, Pajak Daging Pasar Sibolga Nauli, Retribusi Pajak Ikan Basah Pasar Sibolga Nauli, Retribusi Pajak Ikan Basah Pasar Inpres, Retribusi Kamar Mandi Pasar Sibolga Nauli. Dari ketujuh rincian Retribusi Pelayanan Pasar-Los yang paling rendah realisasinya adalah Retribusi Ikan Nauli 46.93% dan Retribusi Kamar Mandi Nauli sebesar 62.89%. Adapun penjelasan atas realisasi ini adalah :
- ✚ Setelah selesainya pembangunan Pasar Sibolga Nauli, pemungutan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena sesuai

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 40 ayat 2 yang berisi: dalam hal Sarana Perdagangan belum dihibahkan, Gubernur atau Bupati/Walikota tidak dapat memungut Retribusi pemanfaatan bangunan Sarana Perdagangan. Banyaknya pedagang yg berjualan Ikan ke luar dari pasar Nauli yaitu sekitar jalan peralihan, dan Pengutipan dimulai bulan Mei.

- c. Retribusi Pelayanan Pasar-Kios terealisasi sebesar 11,71% yang terdiri dari Retribusi Lantai I Pasar Sibolga Nauli, Lantai II Pasar Sibolga Nauli, Lantai III Pasar Sibolga Nauli, Type A Pasar Inpres Aek Habil, Type B Pasar Inpres Aek Habil. Adapun Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-Kios pada Tahun Berjalan (Tahun 2024) adalah sebesar Rp. 541,800,000,00 (11,54%) dan Pembayaran Piutang di Tahun 2024 atas Tunggakan Kontrak Kios tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.400.000,00.

Adapun penjelasan atas realisasi Retribusi Pelayanan Pasar-Kios adalah Jumlah Kios di Lantai I Pasar Sibolga Nauli adalah 137 Kios x Rp. 3.000.000,00 = 411.000.000,00 (Tidak sesuai Potensi dengan jumlah yang di bebaskan) realisasi Kios sampai dengan Desember Rp. 363.000.000,00 (121 Kios). Jumlah Kios di Lantai II Pasar Sibolga Nauli adalah 361 Kios x Rp. 2.250.000,00 = 812.250.000,00 (Tidak sesuai Potensi dengan jumlah yang di bebaskan) realisasi Kios sampai dengan Desember Rp. 137.250.000,00 (61 Kios) adanya Penolakan dari Pedagang untuk Penerimaan Perda Baru di Kios Lantai II, Jumlah Kios di Lantai III Pasar Sibolga Nauli adalah 16 Kios x Rp. 750.000,00 = 12.000.000,00 (Tidak sesuai Potensi dengan jumlah yang di bebaskan) realisasi Kios sampai dengan Oktober Rp.5.250.000,00 (7 Kios)

- d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP terealisasi sebesar 0%. Adapun penyebab rendahnya realisasi karena tidak adalagi Pengutipan di Teraulang
- e. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan yaitu Sewa kios Jl. Rajawali terealisasi sebesar 0% karena Pedangang yang menempati Kios di Raja wali menolak Perda baru yaitu Perda No.01 Tahun 2024 sebesar Rp.4.000.000,00/Tahun
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar 26.17%. Adapun penyebab rendahnya realisasi karena Sedikitnya Lahan Parkir yang ada di Pasar Sibolga Nauli sehingga beban PAD yang dibebankan tidak sesuai dengan Lapangan dan Pengutipan dimulai bulan Mei Tahun 2024.

II. BELANJA

Anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 terealisasi sebesar 80,22% atau sebesar Rp. 14.684.195.148,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rician Belanja Operasi Rp. 10.826.408.801,00 dan Belanja Modal Rp. 3.857.786.347,00.

Adapun penjelasan untuk beberapa sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar 81,33%. Hal ini disebabkan keuangan tidak cukup untuk membayarkan kegiatan dan akan dibayarkan pada Tahun 2025 (Tunda Bayar). Dana bersumber dari Insentif Fiskal;
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan realisasi anggaran sebesar 75,55%. Hal ini disebabkan keuangan tidak cukup

untuk membayarkan kegiatan dan akan dibayarkan pada Tahun 2025 (Tunda Bayar). Dana bersumber dari Insentif Fiskal;

3. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 99,32%. Dana bersumber dari Insentif Fiskal dan APBD;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 76,28%;
5. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 91,64%, dana bersumber dari Dana Insentif Fiskal dan APBD.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, setelah diadakan analisis dan evaluasi dari setiap indikator. Dari segi akuntabilitas keuangan, dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 dan Insentif Fiskal dengan Pagu Anggaran untuk Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 9.216.980.410,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) dan Pagu Anggaran untuk Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 adalah Rp. 14.684.195.148,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rician Belanja Operasi Rp. 10.826.408.801,00 dan Belanja Modal Rp. 3.857.786.347,00.

Urusan Perindustrian terdiri dari 2 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Dari 2 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan ini, diantaranya terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Umum untuk kegiatan rutin Bidang Sekretariat dengan jumlah 1 Program, 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melaksanakan 2 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Dari uraian di atas, walaupun pencapaian indikator kinerja Tahun 2024 masuk dalam kategori Tinggi dan dapat dikatakan berhasil, akan tetapi dalam hal ini untuk tinjauan kedepan atas perubahan-perubahan pelaksanaan, sangat diperlukan sistem pelaksanaan yang benar-benar dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja.

Dalam hal ini, LKIP lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran sebagai suatu bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi untuk kemajuan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dijadikan evaluasi kinerja dimasa yang akan datang demi kemajuan dan efektifitas, produktifitas serta peningkatan kualitas kerja dengan harapan seluruh pihak umumnya dan pimpinan khususnya dapat melihat dan sekaligus mengevaluasi capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga. Adapun kritikan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan, demi perbaikan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga yang jauh lebih baik dari yang telah dihasilkan selama Tahun 2024.

Sibolga, Februari 2025

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA,**



RAMAYANA TAMBUNAN, S.T., M. M.

Pembina Tk. I

NIP. 19720712 199203 2 001

**PETA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA**

VISI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT PINTAR DAN MAKMUR

MISI 1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel

TUJUAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- INDIKATOR TUJUAN**
1. Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
 3. Persentase Penyampaian Pertanggung-jawaban Keuangan tepat Waktu
 4. Nilai Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga

- SASARAN**
1. Penyampaian Dokumen Perencanaan tepat Waktu
 2. Meningkatnya Pelayanan Kantor
 3. Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan tepat Waktu
 4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

- STRATEGI**
1. Penyampaian Dokumen Perencanaan tepat Waktu melalui Koordinasi dan Asistensi OPD yang terkait dengan Perencanaan
 2. Peningkatan Pelayanan Kantor melalui Birokrasi yang Efektifitas dan Efisiensi
 3. Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan tepat Waktu melalui Sistem Aplikasi Keuangan dan Data - Data Keuangan dengan baik

- KEBIJAKAN**
1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Perencanaan
 2. Menyiapkan Aparatur dan Sarana Penunjang Pelayanan dengan Optimal
 3. Koordinasi dan Rekonsiliasi Rutin dengan Dinas Terkait mengenai Laporan Keuangan

MISI3
Membuka Lapangan Kerja dan Peluang Berusaha dengan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan serta Menjalin Kerjasama dengan Pelaku Ekonomi Lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga

TUJUAN
Mewujudkan Pertumbuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan IKM dan Usaha Perdagangan

- INDIKATOR TUJUAN**
1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
 2. Pertumbuhan Industri
 3. Jumlah Pengrajin yang mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan
 4. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
 5. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan Bantuan
 6. Jumlah UTTP yang ditera
 7. Persentase Pengawasan Produk yang Beredar dalam Keadaan Terbungkus maupun Tidak Terbungkus yang diduga terindikasi Zat-Zat Berbahaya terhadap Ketentuan yang Berlaku
 8. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

- SASARAN**
1. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen

- STRATEGI**
1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar
 - Meningkatkan Penataan Berkelanjutan dalam Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha/Pedagang
 - Meningkatkan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
 - Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal
 - Meningkatkan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Meningkatkan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

- KEBIJAKAN**
1. Melaksanakan Pemeliharaan dan Pembangunan/Revitalisasi Pasar
 - Melaksanakan Pembinaan Pedagang, Penataan tempat Berusaha dan Fasilitas bagi Pedagang
 - Melaksanakan Monitoring Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
 - Melaksanakan Kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
 - Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

- SASARAN**
1. Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk

- STRATEGI**
1. Meningkatkan pelatihan, pembinaan dan pengembangan IKM/Pengrajin
 - Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Produk, Menggali Peluang dan Memperkenalkan Produk Unggulan
 - Menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan IKM/Pengrajin
 - Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

- KEBIJAKAN**
- Melaksanakan Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan IKM/Pengrajin
 - Melaksanakan Promosi dan Pameran Produk, Pengembangan Produk dan Meningkatkan Pemasaran Produk Berbasis E-Commerce
 - Melaksanakan Kegiatan penguatan atau pengembangan berkelanjutan bagi IKM/pengrajin untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan produk serta mempromosikan produk.
 - Mengembangkan, memfasilitasi dan meningkatkan peran sentra-sentra industri

PROGRAM OPD

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

SASARAN PROGRAM URUSAN

1. Meningkatkan Pengawasan atas Perizinan Perusahaan/Pelaku Usaha dan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan atas Produk
2. Meningkatkan Pembangunan atau Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan
3. Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Meningkatkan Pelaksanaan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Meningkatkan Promosi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Industri
8. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri

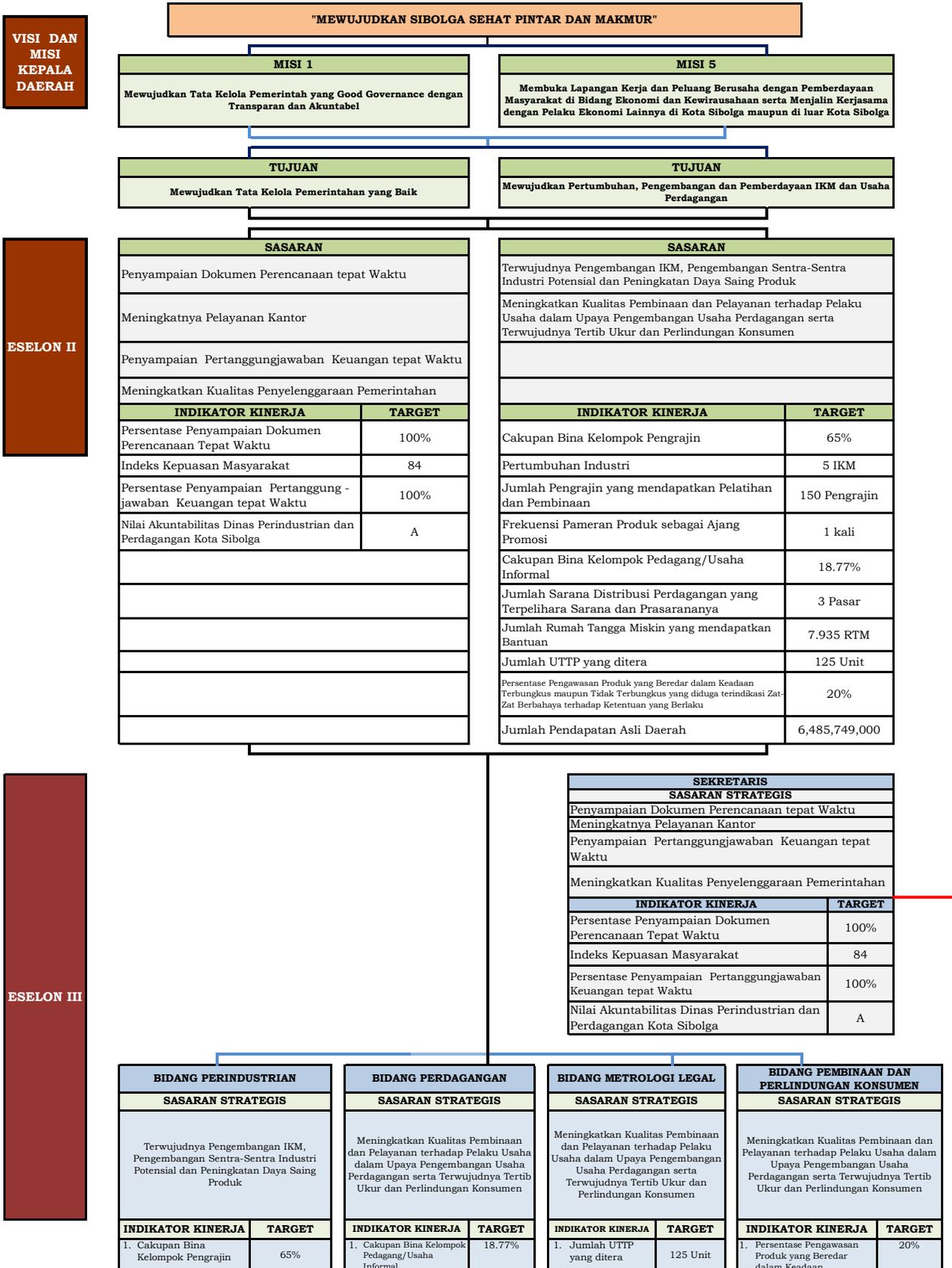
INDIKATOR PROGRAM URUSAN

1. Presentase komoditi/produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
3. Pemantauan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang
5. Jumlah Promosi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Persentase Pembuatan Perencanaan Kerja, Evaluasi, Pelayanan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Kantor
7. Cakupan bina kelompok IKM/Pengrajin
8. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

1. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2.1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - 3.1. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
4. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - 4.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota
 - 4.2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - 4.3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
5. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - 5.1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang
6. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 6.1. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 7.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 8.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 9.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 9.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 9.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 9.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 9.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 10.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 11.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 11.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 11.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 12.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 12.2. Pemeliharaan Mebel
 - 12.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 12.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 13.1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 13.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 13.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 13.4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
14. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 14.1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - 14.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Gambar 7.2
POHON KINERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA TAHUN 2024



2. Pertumbuhan Industri	5 IKM	2. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan Bantuan	7.935 RTM	2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	Terbungkus maupun Tidak Terbungkus yang diduga terindikasi Zat-Zat Berbahaya terhadap Ketentuan yang Berlaku	
3. Jumlah Pengrajin yang mendapatkan	150 Pengrajin						

ESELON IV

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatnya Pelayanan Kantor	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jasa administrasi perkantoran	12 Bulan
2. RKMBD	1 Dokumen
3. Jumlah pengadaan barang milik daerah 2024	0 Unit
4. Pemeliharaan Barang Inventaris	12 Bulan
5. Laporan Inventaris Barang	1 Laporan
6. Jasa Kehumasan dan Keprotokolan	12 Bulan
7. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,53

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
SASARAN STRATEGIS	
Penyampaian Dokumen Perencanaan tepat Waktu	
Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan tepat Waktu	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Dokumen RKPD 2023 dan RKA/RKPA 2023 dan DPA/DPPA 2024	8 Dokumen
2. Dokumen evaluasi Renstra dan Renja 2024	4 Dokumen
3. Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja 2024	2 Dokumen
4. Dokumen LKJP 2024, LPT 2024, LPPD 2024, evaluasi RKPD 2024 dan LKPJ 2024	5 Dokumen
5. Laporan urusan tata laksana keuangan	172 Dokumen
6. Laporan Perbendaharaan dan gaji	14 Dokumen
7. Laporan verifikasi dan akuntansi	172 Dokumen
8. Laporan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	24 Laporan
9. Dokumen laporan keuangan 2023	1 Dokumen

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatnya Pelayanan Kantor	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Pelayanan dan Evaluasi Kepegawaian	12 Bulan
2. Rekapitulasi Absensi	12 Laporan
3. Menyiapkan berkas Pengusulan Pensiun, Askes, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti Pegawai, Penghargaan Satya	12 Laporan
4. Jumlah Laporan LHKPN	7 Pegawai
5. Menyiapkan Penghimpunan perencanaan SKP Tahunan	12 Laporan
6. Memperbaharui Struktur dan Peta Jabatan Dinas Perindag	1 Laporan
7. Laporan lainnya	12 Laporan
8. Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11 orang

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN	
SASARAN STRATEGIS	
Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen
3. Jumlah pengrajin yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	150 Pengrajin
4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen

KEPALA SEKSI MASSA DAN TIMBANGAN	
SASARAN STRATEGIS	
Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah UTTP yang ditera	125 Unit
2. Laporan Pelaksanaan Pelayanan tera-tera ulang massa dan timbangan	12 Laporan

KEPALA SEKSI PROMOSI, KERAJINAN DAN SARANA USAHA	
SASARAN STRATEGIS	
Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen

KEPALA SEKSI UKURAN ARUS PANJANG DAN VOLUME	
SASARAN STRATEGIS	
Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	125 Unit
2. Laporan Pelaksanaan Pelayanan tera-tera ulang ukuran arus Panjang dan volume	12 Laporan

KEPALA SEKSI PENDAFTARAN PENGAWASAN INDUSTRI	
SASARAN STRATEGIS	
Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui	1 Dokumen
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri	12 Dokumen
3. Pertumbuhan Industri	5 IKM

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENYULUHAN BIDANG METROLOGI LEGAL	
SASARAN STRATEGIS	
Terwujudnya Pengembangan IKM, Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing Produk	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Laporan Pelaksanaan sidang Tera-Tera Ulang Metrologi Legal	12 Laporan

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan
3. Jumlah RTM yang mendapatkan bantuan	7.935 RTM

KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Laporan hasil pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan
2. UMKM yang diperiksa pada Pemeriksaan dan Kunjungan Produk Mewujudkan Pasar Sehat	15 UMKM

KEPALA SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI USAHA PERDAGANGAN	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan	Pedagang
2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KONSUMEN	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi	UMKM
2. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	2 Kali

KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN USAHA PERDAGANGAN	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan	

KEPALA SEKSI INFORMASI, STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya	

Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/dipelihara	Unit
2. Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya	Sarana Distribusi Perdagangan

Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi tentang Pemakaian Produk yang Layak Dikonsumsi dan dipakai	12 Laporan
2. Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Pembinaan ke Sentra Industri	12 Laporan
3. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan

KEPALA UPT PASAR	
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	
INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Jumlah Pendapatan Asli	6,485,749,000